

## TEKAN PENAMBAHAN PEROKOK PEMULA

# Pemkab Gencar Operasi Peredaran Tembakau Ilegal

**SLEMAN (KR)** - Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Pemkab Sleman menggelar operasi bersama Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau.

Operasi dilakukan bekerjasama dengan tim gabungan dari Bea Cukai, Kodim, Polres, Satuan Polisi Pamong Praja, Datasemen Polisi Militer, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman ini menyasar toko ritel hasil tembakau di Kapanewon Seyegan dan Minggir.

Fungsional Penyidik Bea Cukai DIY Depdika mengatakan, operasi ini penting dilakukan karena peredaran tembakau ilegal di masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan, terutama untuk mengoptimalkan penerimaan negara di sektor cukai dan untuk menekan pertumbuhan jumlah perokok pemula. "Ketika sebuah produk tembakau meng-

gunakan pita cukai ilegal, maka harganya akan lebih murah," ujarnya, Kamis (18/11).

Menurut Depdika, masyarakat dapat melihat sendiri untuk memastikan apakah sebuah produk tembakau itu ilegal atau tidak. Hasil tembakau ilegal dapat dilihat dari ada atau tidaknya pita cukai. Pada pita cukai tersebut, ada beberapa indikator yang bisa dilihat apakah sebuah produk tembakau itu legal atau tidak.

"Terkait pita cukai, setidaknya ada 5 pelanggaran (indikator). Pertama adalah pelanggaran produk tembakau polos atau tidak dilekati pita cukai. Pelanggaran ini yang paling sering ditemui di masyarakat. Kedua, masyarakat bisa meli-

hat apakah pita cukai yang digunakan merupakan pita cukai bekas. Hal ini dapat terlihat dari kondisi pita yang tidak normal, seperti ada bekas sobekan, kotor, ada bekas lipatan, dan warna pita yang pudar. Ketiga, pita cukai ilegal dapat dilihat dari orisinalitasnya (keasliannya). Pita cukai palsu diproduksi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti tidak ada hologramnya, tidak ada lambang negara, tidak memuat informasi mengenai tarif cukai, tidak sesuai dengan spesifikasi," ungkap Depdika.

Kemudian untuk pelanggaran keempat, dapat dilihat dari peruntukkan pitanya apakah sesuai atau tidak. Tembakau yang beredar di masyarakat memiliki jenis yang berbeda. "Misalnya SKM (Sigaret Kretek Mesin) harus menggunakan pita cukai SKM, bukan SKT (Sigaret Kretek Tangan). Terakhir, pelanggaran pita cukai dapat dilihat dari perison-



KR-Istimewa

Petugas saat memeriksa sebuah toko yang menjual tembakau.

alisisasi pita, karena tiap pita cukai memiliki kode khusus milik suatu perusahaan yang tidak bisa digunakan oleh perusahaan lainnya," jelasnya.

Depdika berharap dengan in-

dikator tersebut masyarakat yang merupakan target pasar terkecil peredaran tembakau ilegal dapat lebih memahami apakah sebuah produk tembakau itu legal atau tidak.

"Harapannya, ketika market pasar paling bawah tidak mau lagi membeli, otomatis pasar (rokok ilegal) tidak ada, dan produksinya juga tidak ada," pungkasnya. (Has)-f

## Tangani Covid, Baznas Sleman Alokasikan Rp 1 M

**SLEMAN (KR)** - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sleman mengalokasikan dana Rp 1 miliar untuk membantu Pemkab Sleman dalam menangani pandemi Covid-19. Bantuan diserahkan oleh Ketua Baznas Sleman Kriswanto kepada Wakil Bupati Danang Maharsa di Kantor Setda Sleman, Kamis (18/11).

Menurut Kriswanto, bantuan tersebut bersumber dari zakat, infak dan sedekah (ZIS) ASN Pemkab Sleman, pengusaha dan warga Sleman yang dihimpun oleh Baznas. "Target penghimpunan dana ZIS tahun 2021 sebesar Rp 5,5 miliar dan hingga akhir Oktober 2021 penghimpunan ZIS oleh Baznas Sleman bisa tercapai melebihi target, yaitu sebesar Rp 6 miliar," ungkapnya.

Dijelaskan pula, pentasharufan dan pendayagunaan ZIS ini dilaksanakan dalam bentuk lima program yaitu Sleman Produktif, Sleman Sehat, Sleman Cerdas, Sleman Takwa dan Sleman Peduli.



KR-Istimewa

Wabup Danang didampingi Ketua Baznas Kriswanto menyerahkan bantuan untuk Sleman Cerdas.

Rincian bantuan tersebut untuk Sleman Cerdas sebesar Rp 724.900.000, Sleman Produktif (Kita Jaga Usaha) Rp 110.620.000, Sleman Peduli anak yatim piatu Rp 90 juta (Bantuan Program Sosial Bank Indonesia), Sleman peduli covid perempuan terdampak Rp 71 juta, dan Sleman Sehat Rp 50 juta.

Wabup Danang Maharsa berharap dengan kegiatan ini mampu membangun komitmen dalam memperbaiki kesanggupan dan kesadaran bersama untuk meningkatkan pengumpulan zakat seluruh masyarakat

di Kabupaten Sleman. "Selain itu secara substansial, zakat termasuk kategori kewajiban yang mempunyai dua dimensi penghambaan diri kepada Allah dan dimensi sosial," jelasnya.

Ditambahkan, dimensi sosial zakat terlihat pada objek utamanya yakni pemenuhan kebutuhan hidup mustahiq yang mayoritas masyarakat ekonomi kelas bawah dan peningkatan taraf hidup mereka supaya terbebas dari kemiskinan, dapat hidup layak dan berbalik menjadi penolong bagi orang lain yang menerima bantuan. (Has)-f

## Media Massa Harus Beradaptasi dengan Teknologi Digital

**SLEMAN (KR)** - Pesatnya perkembangan teknologi yang tidak dapat diprediksi pada saat ini membuat industri media massa mau tidak mau harus bertransformasi dan terus beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi digital. Demikian dikatakan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa saat membuka pelatihan 'Digital Media Reporter' bagi jurnalis dan Humas di Hotel Grand Keisha, Rabu (17/11).

Menurutnya, agar media massa menciptakan publikasi berita dan informasi yang memenuhi standar, sesuai dengan kaidah dan etika jurnalistik serta keamanan informasi digital, maka perlu peningkatan

sumber daya manusia (SDM), baik jurnalis media maupun pegawai kehumasan. Di antaranya keterampilan digital. "Untuk mewujudkan keberhasilan penyampaian informasi atau berita yang benar serta sesuai dengan kaidah jurnalistik, reporter dan humas harus terus diberikan kesempatan dan ruang untuk meningkatkan serta mengasah keterampilan dengan pelatihan," kata Danang.

Sementara Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP) Kominfo Yogyakarta Zulkarnaen mengatakan selain memberikan kesempatan bagi reporter dan humas dalam

meningkatkan keterampilan digital, pelatihan ini juga untuk mengembangkan talenta-talenta digital. Ada pun jumlah peserta pelatihan sebanyak 60 orang. Mereka telah melaksanakan pelatihan selama 10 hari yaitu 7 hari secara daring dan 3 hari secara luring.

Materi pelatihan dalam kegiatan ini mencakup sembilan unit kompetensi mulai dari kompetensi mengumpulkan data dan informasi bahan berita dengan menggunakan digital tools sampai dengan kompetensi menerapkan sistem keamanan informasi digital. Selain itu ada materi fotografi dan foto jurnalistik serta videografi. (Cdr)-f

## Siswa Didorong Cinta NKRI dengan Prestasi

**NGAGLIK (KR)** - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mendorong para pelajar untuk menorehkan prestasi sebagai bentuk kecintaan terhadap NKRI. Kecintaan terhadap NKRI dapat dimaknai dengan berbagai hal salah satunya dapat diisi dengan hal positif.

"Generasi penerus bangsa (pelajar) dapat melakukan berbagai hal yang bersifat positif dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Para pelajar dapat berprestasi di bidangnya masing-masing namun harus tetap

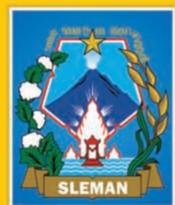
ingat kepada bangsa dan negara," ujar Danang dalam kegiatan 'Wawasan Kebangsaan Goes to School' di SMPN 3 Ngaglik, Selasa (16/11).

Menurut Danang, generasi penerus bangsa memiliki tuntutan mengikuti perkembangan zaman untuk dapat memiliki daya saing. Adanya perkembangan teknologi informasi saat ini dapat membantu para pelajar untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan.

"Perkembangan zaman juga harus

diikuti asalkan tidak berlebihan dan tidak membuat kita melupakan budaya bangsa kita sendiri. Perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan aktualisasi diri dan menunjang prestasi," jelasnya.

Danang juga mengimbau agar para pelajar senantiasa berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi informasi yang kerap dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi bohong (hoax). (Has)-f



# DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

## KINERJA KOMISI D DPRD KABUPATEN SLEMAN

# Maksimalkan Penyerapan JPS untuk Atasi Problem Sosial



KR-Istimewa

M Zuhdan SPd MAP

**SLEMAN (KR)** - Pemerintah Kabupaten Sleman telah menganggarkan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Tahun 2021 sekitar Rp 10 miliar. Namun sampai saat ini masih tersisa Rp 2 miliar. Komisi D berharap, sisa anggaran bisa dimaksimalkan penyerapannya untuk mengatasi problem sosial di Kabupaten Sleman.

Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Sleman M Zuhdan SPd MAP mengatakan, Komisi D

DPRD Kabupaten Sleman mendorong anggaran JPS setiap tahunnya bisa selalu naik. Dengan catatan penyerapan anggaran JPS bisa terserap secara maksimal. "Seperti kita ketahui bersama, bahwa program JPS sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Khususnya yang tidak terkover jaminan sosial dari pemerintah. Salah satu syarat anggaran bisa selalu naik yaitu penyerapannya bagus," kata Zuhdan.

Untuk penyerapan saat ini, Zuhdan menilai belum maksimal karena dari anggaran sekitar Rp 10 miliar, masih tersisa sekitar Rp 2 miliar. Pihaknya berharap sisa anggaran itu bisa dimaksimalkan penyerapannya karena pada masa pandemi ini, banyak problem sosial yang belum terpecahkan.

"Pandemi hampir 2 tahun. Kami yakin permasalahan sosial juga akan meningkat. Kami mendorong, bagaimana caranya anggaran ini bisa terserap secara maksimal untuk mengatasi masalah

sosial," ucapnya.

Permasalahan sosial yang dapat diselesaikan menggunakan JPS, di antaranya tunggakan pembayaran SPP, biaya rumah sakit dan lainnya. "Kalau mempunyai masalah sosial, masyarakat bisa mengakses program JPS. Soalnya tujuan JPS itu untuk meringankan beban warga miskin dan rentan miskin," ucap warga Sidokarto ini.

Jika ada yang kesulitan meng-

akses langsung ke pemerintah daerah, Zuhdan mengimbau kepada masyarakat untuk datang ke anggota DPRD Sleman. Nantinya anggota dewan akan mengadakan program JPS. "Silakan datang ke anggota dewan supaya dibantu untuk mengakses program JPS. Sehingga segala permasalahan sosial di Sleman bisa dituntaskan dengan program ini," ucap politisi dari Fraksi PKS ini.



KR-Istimewa

Yani menyerahkan bantuan kursi roda dari program JPS.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi D lainnya, Yani Fathurrahman SPdI. Menurutnya, program JPS ini tidak hanya sektor pendidikan, namun juga kesehatan. Pada prinsipnya, masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah dapat dibantu melalui JPS. "Jangan sampai gara-gara sakit, orang rentan miskin menjadi miskin. Harapannya, program JPS ini menjadi sapu jagad untuk menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat Sleman," kata Yani.

Diterangkan, untuk syarat mendapatkan program JPS di antaranya surat keterangan tidak mampu dari kalurahan dan kuitansi pembayaran. Nanti Dinas sosial akan mengganti biaya kesehatan tersebut. "Tapi syaratnya kelas 3 dan maksimal bantuan Rp 5 juta. Dan kami rasa bantuan tersebut cukup membantu dalam meringankan masalah sosial," ujarnya.

Tak hanya rawat inap saja, JPS ini juga bisa untuk membantu kaum difabel, lansia, alat bantu



KR-Istimewa

Yani Fathurrahman SPdI

pendengaran, kruk dan lainnya. Yani meminta kepada pemerintah daerah lebih menggiatkan kembali sosialisasi tentang program JPS. "Sosialisasi tidak hanya cukup sampai tingkat kapanewon dan kalurahan saja. Tapi sampai masyarakat secara luas. Semakin banyak masyarakat yang mengakses, semakin baik. Soalnya masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai program ini," ujar anggota dewan dari Cangkringan ini. (Sni)-f